



Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendidikan Kewarganegaraan dalam Meningkatkan Partisipasi Sosial

Fatiani Lase¹, Berkat Persada Lase²

^{1,2}Universitas Nias, Indonesia

E-mail: fatianilase1965@gmail.com

| Article Info | Abstract |
|---|---|
| Article History Received: 2025-06-10 Revised: 2025-07-20 Published: 2025-08-07 | <p>This study aims to determine the role of community empowerment through civic education in increasing social participation, as well as the obstacles and efforts involved. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data was collected through observation, interviews, and documentation of villagers, community leaders, village officials, and young people who are considered to understand local social dynamics. The results of the study and discussion conclude that: Civic education plays a strategic role in empowering communities and increasing social participation. Through this educational process, communities are equipped with an awareness of their rights and responsibilities as citizens, critical thinking skills, and positive attitudes that support active involvement in social and political life. This role is evident in increased awareness, the development of social skills, the formation of democratic attitudes, the facilitation of public dialogue, and access to relevant information. However, the effectiveness of this empowerment faces a number of obstacles, including low community understanding of the concept of civic education, disparities in participation between age and education groups, the use of non-contextual terms, a lack of competent facilitators, and limitations in infrastructure and budget. These challenges highlight the need for a more inclusive, contextual, and locally-based approach. As a solution, various efforts need to be undertaken, such as developing a curriculum relevant to community life, implementing participatory learning methods, consistently instilling national values, improving digital literacy, involving external communities, and establishing social change agents.</p> |
| Keywords: <i>Pemberdayaan Masyarakat; Pendidikan Kewarganegaraan; Partisipasi Sosial.</i> | |

| Artikel Info | Abstrak |
|---|--|
| Sejarah Artikel Diterima: 2025-06-10 Direvisi: 2025-07-20 Dipublikasi: 2025-08-07 | <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan partisipasi sosial, kendala dan upayanya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap warga desa, tokoh masyarakat, perangkat desa, dan pemuda yang dianggap memahami dinamika sosial setempat. Hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa: Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam memberdayakan masyarakat dan meningkatkan partisipasi sosial. Melalui proses pendidikan ini, masyarakat dibekali kesadaran akan hak dan tanggung jawab kewarganegaraan, keterampilan berpikir kritis, serta sikap positif yang mendukung keterlibatan aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Peran ini terlihat dalam peningkatan kesadaran, pengembangan keterampilan sosial, pembentukan sikap demokratis, fasilitasi dialog publik, dan akses terhadap informasi yang relevan. Namun, efektivitas pemberdayaan ini menghadapi sejumlah kendala, antara lain rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep PKn, ketimpangan partisipasi antar kelompok usia dan pendidikan, penggunaan istilah yang tidak kontekstual, kurangnya fasilitator yang kompeten, serta keterbatasan infrastruktur dan anggaran. Kendala ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif, kontekstual, dan berbasis budaya lokal. Sebagai solusi, berbagai upaya perlu dilakukan, seperti pengembangan kurikulum yang relevan dengan kehidupan masyarakat, penerapan metode pembelajaran partisipatif, penanaman nilai-nilai kebangsaan secara konsisten, peningkatan literasi digital, pelibatan komunitas eksternal, serta pembentukan agen perubahan sosial.</p> |
| Kata kunci: <i>Community Empowerment; Civic Education; Social Participation.</i> | |

I. PENDAHULUAN

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memegang peranan penting dalam menumbuhkan kesadaran warga negara untuk aktif berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan

politik. Dalam konteks masyarakat desa, pendidikan kewarganegaraan memiliki potensi besar untuk mendorong kesadaran kolektif warga akan pentingnya keterlibatan dalam proses pembangunan. Pemberdayaan masya-

rakat melalui pendidikan kewarganegaraan bukan hanya membekali individu dengan pengetahuan hak dan kewajiban, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral, etika publik, dan semangat partisipatif.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pembangunan. Melalui proses ini, masyarakat didorong untuk mengenali potensi diri, menyadari peran sosialnya, dan mengambil bagian dalam kehidupan publik. Pendidikan kewarganegaraan yang dirancang berbasis komunitas menjadi salah satu pendekatan strategis dalam mendorong transformasi sosial yang berakar dari bawah (Ramdani & Suryani, 2022).

Observasi awal yang dilakukan di Desa Holi, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara menunjukkan rendahnya tingkat partisipasi sosial dalam berbagai kegiatan masyarakat. Misalnya, dalam kegiatan musyawarah desa atau kerja bakti, kehadiran warga cenderung rendah dan didominasi oleh kelompok usia tertentu. Beberapa warga menyatakan bahwa mereka tidak memahami fungsi forum desa, merasa tidak dilibatkan, atau merasa tidak memiliki kewenangan menyuarakan pendapat.

Minimnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara menjadi salah satu kendala utama dalam membangun partisipasi sosial. Banyak warga menganggap urusan pemerintahan adalah ranah perangkat desa semata, bukan menjadi tanggung jawab bersama. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan belum benar-benar menyentuh lapisan masyarakat secara luas dan bermakna.

Dalam penelitian Rahayu dan Syamsudin (2021), disebutkan bahwa partisipasi sosial masyarakat desa meningkat secara signifikan ketika pendidikan kewarganegaraan diberikan dalam bentuk pelatihan yang kontekstual dan berbasis praktik. Kegiatan seperti diskusi warga, simulasi musyawarah, dan pelatihan kepemimpinan lokal terbukti efektif membangun kesadaran warga terhadap pentingnya keterlibatan dalam kehidupan sosial.

Nilai-nilai PKn seperti gotong royong, musyawarah, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial sejatinya telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Namun, nilai-nilai tersebut memerlukan penguatan secara sistematis agar tidak hanya menjadi simbolik, tetapi betul-betul terinternalisasi dalam perilaku sosial warga. Pendidikan kewarganegaraan dapat berfungsi sebagai pengikat antara nilai-nilai lokal

dan prinsip-prinsip kewargaan yang demokratis (Yuliana & Prasetyo, 2023).

Untuk mewujudkan masyarakat yang partisipatif, diperlukan pendekatan yang integratif antara pendidikan formal, informal, dan nonformal. Pendidikan kewarganegaraan harus mampu menjembatani kesenjangan informasi dan pemahaman warga, terutama di daerah pedesaan yang akses terhadap pendidikan masih terbatas. Pemerintah desa, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat perlu bersinergi dalam menghadirkan pendidikan kewarganegaraan yang aplikatif dan menyentuh kebutuhan lokal.

Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kewarganegaraan harus mempertimbangkan aspek budaya, kearifan lokal, dan konteks sosial masyarakat setempat. Ketika warga merasa pendekatan yang digunakan sesuai dengan kehidupan mereka sehari-hari, maka proses internalisasi nilai akan lebih efektif. Pelibatan tokoh adat dan agama dalam penyampaian nilai-nilai kewargaan dapat memperkuat daya terima masyarakat terhadap program tersebut.

Melalui pendekatan pendidikan yang tepat, warga dapat menjadi lebih kritis, peduli, dan aktif dalam kehidupan sosial. Partisipasi tidak hanya dalam bentuk fisik seperti kerja bakti, tetapi juga dalam pengambilan keputusan, pengawasan, dan pemecahan masalah bersama. Pendidikan kewarganegaraan yang membekali warga dengan fondasi kuat bagi terbentuknya masyarakat yang berdaya, mandiri, dan demokratis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi sarana pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi sosial di Desa Holi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan model pemberdayaan berbasis nilai-nilai kewargaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi sosial. Lokasi penelitian berada di Desa Holi, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, yang dipilih secara purposif karena mencerminkan karakteristik umum masyarakat pedesaan yang masih mengalami tantangan dalam partisipasi sosial. Subjek penelitian terdiri dari warga desa,

tokoh masyarakat, perangkat desa, dan pemuda yang dianggap memahami dinamika sosial setempat.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara ditujukan kepada informan kunci seperti kepala desa dan tokoh masyarakat, sementara observasi dilakukan dalam kegiatan sosial seperti musyawarah dan gotong royong. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan model Miles dan Huberman. Untuk menjaga validitas temuan, dilakukan triangulasi sumber dan teknik, serta konfirmasi hasil kepada informan (member checking).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Kewarganegaraan dalam Meningkatkan Partisipasi Sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ada beberapa peran pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan partisipasi sosial yaitu:

- a) Peningkatan Kesadaran: Pendidikan kewarganegaraan membantu masyarakat memahami hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Kesadaran ini mendorong mereka untuk terlibat dalam aktivitas sosial dan politik. Seperti yang diungkapkan oleh Pradipto & Utomo (2020) dalam studi mereka mengenai pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, yang menekankan pentingnya pemahaman konsep dasar kewarganegaraan untuk mendorong partisipasi aktif.
- b) Pengembangan Keterampilan: Melalui pendidikan kewarganegaraan, masyarakat dilatih untuk mengembangkan keterampilan kritis, analitis, dan komunikasi. Keterampilan ini penting untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi, debat, dan pengambilan keputusan di tingkat komunitas. Tanpa keterampilan ini, partisipasi mungkin menjadi kurang efektif atau bahkan tidak ada sama sekali. Penekanannya adalah pada pengembangan literasi kewarganegaraan, yang mencakup kemampuan untuk memahami dan menanggapi isu-isu sipil dan politik secara rasional (Ichsan & Prasetyo, 2021).
- c) Pembentukan Sikap Positif: Pendidikan ini menanamkan nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, dan saling menghormati. Sikap

positif ini memperkuat ikatan sosial dan mendorong individu untuk terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan. Menurut penelitian oleh Wiranata (2018), pendidikan kewarganegaraan yang berfokus pada nilai-nilai moral dan etika dapat secara signifikan meningkatkan kepedulian sosial dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan.

- d) fasilitasi Dialog dan Diskusi: Pendidikan kewarganegaraan menciptakan ruang untuk dialog dan diskusi tentang isu-isu sosial dan politik. Hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan berkontribusi pada solusi. Adnan (2020) menyoroti bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat membekali individu dengan kemampuan berdialog dan berdiskusi secara konstruktif, yang esensial untuk menjaga stabilitas sosial dan politik.
- e) Pemberian Akses Informasi: Dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang kebijakan publik, hak-hak warga, dan cara berpartisipasi, pendidikan kewarganegaraan memberdayakan masyarakat untuk mengambil langkah aktif. Pentingnya literasi informasi dalam mendorong partisipasi politik ditekankan oleh penelitian-penelitian modern yang menunjukkan bahwa akses mudah ke informasi yang kredibel meningkatkan kepercayaan publik dan keinginan untuk terlibat (Putra & Hidayat, 2019).

2. Kendala Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Kewarganegaraan dalam Meningkatkan Partisipasi Sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi ada beberapa kendala dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kewarganegaraan untuk meningkatkan partisipasi sosial di Desa Holi. Kendala-kendala ini mencakup aspek kognitif, sosial, budaya, dan struktural yang saling memengaruhi.

Pertama, rendahnya pemahaman awal warga terhadap konsep pendidikan kewarganegaraan menjadi tantangan utama. Sebagian besar warga menganggap pendidikan kewarganegaraan (PKn) sebagai materi sekolah formal semata, bukan sebagai bagian dari kehidupan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa masih terjadi pemisahan antara pendidikan dan praktik kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Arifin (2021) yang menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan bukan hanya instrumen pendidikan formal, tetapi wahana strategis untuk menanamkan nilai-nilai sosial dan demokrasi dalam kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.

Kedua, terjadi ketimpangan dalam partisipasi sosial berdasarkan usia dan tingkat pendidikan. Warga usia produktif dan berlatar belakang pendidikan menengah cenderung lebih aktif dalam kegiatan komunitas dibandingkan warga yang lebih tua atau berpendidikan rendah. Mereka lebih mudah memahami konsep-konsep kewarganegaraan dan merasa lebih percaya diri untuk terlibat dalam diskusi atau forum musyawarah. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan kapasitas sosial di dalam komunitas itu sendiri, yang dapat memperlemah kohesi sosial apabila tidak diatasi secara strategis.

Ketiga, kendala juga muncul dari penggunaan bahasa dan istilah yang tidak familiar bagi masyarakat. Istilah seperti "demokrasi partisipatif", "hak sipil", atau "pengawasan warga" dianggap terlalu abstrak bagi sebagian peserta pelatihan. Kurangnya adaptasi terhadap bahasa lokal menghambat pemahaman dan internalisasi nilai-nilai yang ingin ditanamkan. Sebagaimana disampaikan oleh Sari dan Abdullah (2021), pendekatan pendidikan kewarganegaraan yang tidak mempertimbangkan aspek kebahasaan dan kultural sering kali gagal menyentuh lapisan masyarakat akar rumput.

Keempat, kurangnya fasilitator yang mampu menjembatani konsep dengan konteks lokal menjadi kendala tersendiri. Beberapa pelatihan disampaikan dengan metode ceramah tanpa melibatkan peserta secara aktif. Padahal, pemberdayaan masyarakat menuntut pendekatan dialogis dan partisipatif. Ramdani dan Suryani (2022) menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan berbasis komunitas akan efektif jika dikemas secara kontekstual dan mendorong partisipasi aktif warga dalam menyusun solusi atas persoalan bersama.

Kelima, terbatasnya dukungan infrastruktur dan anggaran juga menghambat pelaksanaan program secara berkelanjutan. Beberapa kegiatan pelatihan terpaksa ditunda karena ketiadaan tempat yang layak, alat bantu visual, maupun dana operasional. Minimnya komitmen dari pemerintah desa dalam mengalokasikan dana untuk kegiatan

pemberdayaan ini menunjukkan bahwa belum semua pihak memahami pentingnya pendidikan kewarganegaraan sebagai investasi sosial jangka panjang (Wulandari, 2021).

Meskipun demikian, adaptasi terhadap tantangan tersebut mulai dilakukan. Misalnya, penggunaan bahasa daerah, pendekatan naratif melalui cerita rakyat, dan pengaitan materi dengan nilai-nilai adat serta agama terbukti mampu menjembatani pemahaman masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya memudahkan penyampaian pesan, tetapi juga memperkuat keterhubungan antara nilai-nilai kewarganegaraan dengan identitas budaya lokal. Hal ini mendukung hasil penelitian sebelumnya oleh Nugraha (2021) yang menunjukkan bahwa integrasi pendidikan kewarganegaraan dengan budaya lokal dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran nilai dan sikap demokratis di tingkat komunitas.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memang memiliki potensi transformasional, tetapi implementasinya harus mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat secara menyeluruh. Diperlukan pendekatan yang kontekstual, partisipatif, dan berbasis lokal agar nilai-nilai kewarganegaraan tidak hanya dipahami, tetapi juga dihidupi dalam praktik sosial sehari-hari. Dengan mengatasi berbagai kendala yang ada, pendidikan kewarganegaraan akan semakin berperan dalam menciptakan masyarakat yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab secara sosial.

3. Upaya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Kewarganegaraan dalam Meningkatkan Partisipasi Sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi ada beberapa upaya konkret dapat dilakukan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kewarganegaraan guna meningkatkan partisipasi sosial:

- a) Pengembangan Kurikulum yang Relevan dan Kontekstual: Pendidikan kewarganegaraan perlu dirancang agar sesuai dengan konteks lokal dan isu-isu aktual yang dihadapi masyarakat. Materi pelajaran tidak boleh hanya bersifat teoretis, tetapi juga harus mencakup studi kasus nyata, proyek komunitas, dan simulasi yang memungkinkan peserta didik menerapkan konsep-konsep kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-

- hari. Misalnya, membahas masalah lingkungan di desa setempat dan merumuskan solusi bersama dapat menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab.
- b) Penggunaan Metode Pembelajaran Interaktif dan Partisipatif: Metode ceramah satu arah kurang efektif dalam menumbuhkan partisipasi. Sebaliknya, pendekatan yang melibatkan diskusi kelompok, debat, *role-playing*, kunjungan lapangan, dan proyek kolaboratif akan mendorong siswa untuk berpikir kritis, menyampaikan pendapat, dan bekerja sama. Ini sejalan dengan konsep "laboratorium demokrasi" di mana sikap dan perilaku demokratis dikembangkan melalui partisipasi.
- c) Penanaman Nilai-Nilai Kritis dan Kebangsaan: Pendidikan kewarganegaraan harus secara konsisten menanamkan nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, musyawarah mufakat, gotong royong, dan penghargaan terhadap keberagaman. Ini membentuk karakter warga negara yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki integritas moral dan komitmen terhadap kebaikan bersama. Nilai-nilai ini menjadi landasan bagi partisipasi sosial yang konstruktif.
- d) Peningkatan Literasi Digital dan Media: Di era informasi yang masif, kemampuan untuk menyaring, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara bertanggung jawab menjadi krusial. Pendidikan kewarganegaraan harus membekali masyarakat dengan literasi digital agar mereka dapat mengidentifikasi berita palsu (hoaks), berpartisipasi dalam diskusi *online* secara produktif, dan menggunakan media sosial sebagai alat untuk advokasi sosial. Hal ini akan mendorong partisipasi yang lebih cerdas dan terinformasi.
- e) Keterlibatan Komunitas dan Pihak Eksternal: Pemberdayaan tidak hanya terjadi di dalam kelas. Kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, lembaga pemerintah, dan tokoh masyarakat dapat memberikan pengalaman langsung bagi peserta didik dan masyarakat luas untuk terlibat dalam kegiatan sosial nyata. Contohnya adalah kegiatan sukarela membersihkan lingkungan, program kesejahteraan sosial, atau forum diskusi publik tentang isu-isu lokal.

- f) Pembentukan Agen Perubahan: Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya bertujuan membentuk warga negara yang patuh, tetapi juga agen perubahan yang mampu mengkritisi ketidakadilan dan memperjuangkan perbaikan sosial. Ini berlaku khususnya untuk mahasiswa sebagai "agen perubahan sosial dan pengawal demokrasi" yang perlu dibekali dengan pemahaman kewarganegaraan yang mendalam dan kemampuan berpikir kritis untuk berpartisipasi dalam penegakan hukum yang adil.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam memberdayakan masyarakat dan meningkatkan partisipasi sosial. Melalui proses pendidikan ini, masyarakat dibekali kesadaran akan hak dan tanggung jawab kewarganegaraan, keterampilan berpikir kritis, serta sikap positif yang mendukung keterlibatan aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Peran ini terlihat dalam peningkatan kesadaran, pengembangan keterampilan sosial, pembentukan sikap demokratis, fasilitasi dialog publik, dan akses terhadap informasi yang relevan.

Namun, efektivitas pemberdayaan ini menghadapi sejumlah kendala, antara lain rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep PKN, ketimpangan partisipasi antar kelompok usia dan pendidikan, penggunaan istilah yang tidak kontekstual, kurangnya fasilitator yang kompeten, serta keterbatasan infrastruktur dan anggaran. Kendala ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif, kontekstual, dan berbasis budaya lokal.

Sebagai solusi, berbagai upaya perlu dilakukan, seperti pengembangan kurikulum yang relevan dengan kehidupan masyarakat, penerapan metode pembelajaran partisipatif, penanaman nilai-nilai kebangsaan secara konsisten, peningkatan literasi digital, pelibatan komunitas eksternal, serta pembentukan agen perubahan sosial. Dengan pendekatan yang tepat dan dukungan semua pihak, pendidikan kewarganegaraan akan menjadi wahana transformasional yang mampu menciptakan masyarakat yang sadar, aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosialnya.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Desa dan Lembaga Pendidikan. Diperlukan sinergi antara pemerintah desa, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat untuk merancang program pendidikan kewarganegaraan yang lebih kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan. Dukungan anggaran dan penyediaan fasilitas pelatihan juga harus menjadi prioritas agar program dapat berjalan efektif dan merata.
2. Bagi Fasilitator atau Pengajar. Fasilitator perlu dilatih untuk menggunakan pendekatan berbasis partisipasi dan budaya lokal agar materi lebih mudah dipahami dan diterima masyarakat. Penggunaan bahasa yang sederhana, metode diskusi interaktif, dan studi kasus lokal dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi warga secara lebih luas.
3. Bagi Masyarakat Umum. Masyarakat diharapkan mulai melihat pendidikan kewarganegaraan bukan hanya sebagai pelajaran sekolah, tetapi sebagai bekal penting dalam kehidupan bermasyarakat. Partisipasi dalam forum warga, kegiatan sosial, dan musyawarah desa harus terus didorong sebagai bentuk nyata keterlibatan warga negara.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya. Penelitian lanjutan dapat memperdalam aspek-aspek tertentu, seperti efektivitas metode pengajaran kewarganegaraan berbasis budaya lokal, pengaruh media digital terhadap kesadaran sosial, atau studi perbandingan antar desa untuk mengetahui pola pemberdayaan yang paling efektif dalam meningkatkan partisipasi sosial.

DAFTAR RUJUKAN

- Ramdani, A., & Suryani, T. (2022). Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Komunitas dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 11(1), 55-64. <https://doi.org/10.31227/jpsh.v11i1.2022>
- Rahayu, L., & Syamsudin, A. (2021). Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Pendidikan Kewarganegaraan di Tingkat Desa. *Civic Culture Journal*, 9(2), 123-134. <https://doi.org/10.22236/ccj.v9i2.2021>
- Yuliana, D., & Prasetyo, R. (2023). Internalisasi Nilai Kewarganegaraan Melalui Pendidikan Nonformal. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 5(1), 34-42. <https://doi.org/10.33005/jps.v5i1.2023>
- Arifin, I. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan dan Transformasi Sosial*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sari, N., & Abdullah, M. (2021). Tantangan Literasi Kewarganegaraan di Komunitas Pedesaan. *Jurnal Pendidikan dan Sosial*, 8(1), 45-59.
- Wulandari, R. (2021). Kebijakan Pemerintah Desa dalam Mendukung Pemberdayaan Sosial. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(3), 112-120.
- Nugraha, Y. (2021). Integrasi Nilai Budaya Lokal dalam Pendidikan Kewarganegaraan. *Civics: Jurnal Kewarganegaraan*, 10(1), 67-78.
- Adnan, M. (2020). *Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Karakter Bangsa*. Pustaka Pelajar.
- Ichsan, S., & Prasetijo, M. S. (2021). Literasi Kewarganegaraan dan Partisipasi Politik Generasi Milenial. *Jurnal Pendidikan Civic Hukum*, 6(1), 1-12.
- Pradipto, R., & Utomo, B. B. (2020). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 7(2), 123-134.
- Putra, D. A., & Hidayat, R. (2019). Peran Akses Informasi dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 16(1), 45-58.
- Wiranata, R. (2018). Implementasi Nilai-nilai Pendidikan Kewarganegaraan dalam Meningkatkan Partisipasi Sosial Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 22-35.